

Pemkab Bogor Butuh Tambahan Pasokan Beras

BOGOR (IM) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membutuhkan tambahan pasokan beras setelah sawah seluas 7 hektare di Ciawi, Bogor mengalami puso atau gagal panen.

Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor Tatang Mulyadi di Bogor, Kamis (31/8), menyebutkan bahwa pihaknya mendatangkan beras dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Bogor. "Semua terganggu, kebutuhan konsumsi untuk kabupaten kebanyakan kami mendatangkan dari luar, Karawang, Indramayu," kata Tatang dikutip dari Antara.

kondisi normal, dari seluas 38 ribu hektare sawah yang ada di Kabupaten Bogor baru mampu memenuhi 49 persen kebutuhan beras untuk 5,6 juta jiwa penduduknya.

"(Produksi) 6,4 ton beras per hektare dikalikan 38 ribu hektare. Kemudian, dikalikan per kapita berapa kali makan, kali jumlah penduduk, itu tidak cukup, baru terpenuhi 49 persen," paparnya.

Tatang menyebutkan ada sawah seluas 7 hektare di Ciawi, Bogor, yang dikelola oleh dua kelompok tani mengalami gagal panen dampak El Nino. Distanhorbun Kabupaten Bogor juga mencatat seluas 1,5 hektare sawah mengalami kekeringan berat. ●**pur**

Kementerian PUPR Bangun 191 Unit Rumah Relokasi Tahap III di Cianjur

CIANJUR (IM) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun rumah relokasi tahap III di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebanyak 191 unit untuk warga penyintas gempa yang tinggal di zona merah gempa di Kecamatan Cugenang dan Cianjur.

Juru Bicara Penanganan Bencana Gempa Cianjur, Budi Rahayu Toyib mengatakan, setelah melalui kajian dan pengamatan yang dilakukan BMKG atas lahan perkebunan seluas 3 hektar akhirnya mengeluarkan rekomendasi dapat dilakukan pembangunan.

"BMKG menyatakan lokasi yang akan digunakan untuk perumahan relokasi tahap III di Desa Batulawang, aman dan segera dibangun, nantinya ratusan rumah tersebut akan dihuni warga dari lima desa di Kecamatan Cugenang dan Cianjur," kata Budi di Cianjur, Kamis (31/8).

Pihaknya telah mengajukan Surat Keterangan (SK) bagi calon penghuni rumah relokasi tahap III yang berasal dari Desa Cijedil sebanyak 123 orang, Cibulakan 2 orang, Cibereum 1 orang, Sarampad 11 orang dan Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur sebanyak 53 orang.

Calon penghuni sebelumnya sudah mendaftarkan diri

untuk direlokasi karena kampung asal mereka masuk dalam zona merah yang terlarang berdiri kembali bangunan, nama mereka sudah di SK kan sehingga nanti akan mengisi rumah sesuai nomor pendaftaran.

"Selama menunggu proses relokasi sebagian besar masih tinggal di dalam tenda dan tidak mendapat bantuan lain termasuk stimulan. Harapan kami pembangunan cepat selesai dan warga penyintas tidak lagi tinggal di dalam tenda," katanya.

Sedangkan untuk membangun kembali perekonomian warga penyintas gempa di perumahan relokasi akan diberikan pelatihan keterampilan dari dinas terkait di Pemkab Cianjur seperti pelaku UMKM, tata boga, menjahit, mekanik dan tukang cukur rambut.

Pasalnya ungap Budi, sebagian besar calon penghuni selama ini bekerja sebagai petani, sehingga di perkampungan yang baru akan diberikan keahlian lain agar roda perekonomian mereka tetap berjalan, termasuk memberikan bantuan modal usaha.

"Untuk penunjang lainnya Pemkab Cianjur menyediakan peralatan bagi pelaku usaha sesuai bidangnya tidak berupa uang namun alat yang bisa menunjang produksi saat menjalankan usaha barunya di perumahan relokasi," katanya. ●**pra**

Pemkab Bogor Minta Camat Gerak Cepat Tangani Bencana Kekeringan



Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin.

CIBINONG (IM) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin meminta para Kepala Perangkat Daerah (PD) dan Camat se-Kabupaten Bogor untuk sinergi gerak cepat menangani bencana alam kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor.

Ia juga meminta kepala PD dan Camat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kekeringan ini diprediksi berlangsung hingga September.

"Kita akan memasuki musim penghujan pada Oktober nanti. Kita harus gerak cepat antisipasi secara bersama-sama agar bisa lebih maksimal dalam penanganannya, karena kemarau ini tidak hanya kekeringan, juga potensi kebakaran dan penyakit disentrif kolera, gagal panen dan lainnya," ungap Burhanudin saat memimpin apel di halaman kantor Setda, Rabu (30/8).

Ia mengatakan, Pemkab Bogor secara rutin terus mengirimkan pasokan air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan, sekitar 18 tangki air bersih diturunkan untuk mendistribusikan air bersih secara bergantian ke wilayah yang mengalami kekeringan dan kesulitan pasokan air bersih.

"Ada 18 tangki air bersih kita kirim secara bergantian ke 98 desa setiap harinya, walau belum maksimal harapan kami minimal kebutuhan masyarakat terpenuhi," jelas Burhanudin.

Menurut Burhanudin, selain konsep pada penanganan kekeringan pihaknya juga tengah konsen terhadap penanganan stunting yang massif di Kabupaten Bogor. Salah satunya me-

lalui skema intervensi stunting kolaboratif. Dimana seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) disebar ke 40 Kecamatan, untuk menangani stunting hingga tuntas bersama para camat hingga Desember 2023 mendatang.

"Sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Bogor Bebas Stunting di 2024 mendatang serta mendukung terwujudnya bonus demografi 2045 nanti," ujarnya..

Lebih jauh ia mengatakan, data stunting by name by address (BNBA) sedang disiapkan, diintervensi stunting kali ini ada dua metode yang dilakukan. Pertama, penanganan langsung personal yang mengalami kasus stunting, mulai dari penimbangan, pemeriksaan kesehatan rutin, pengawasan tumbuh kembang dan pemberian makanan tambahan.

Sementara untuk penanganan tidak langsung jika faktor penyebab rumah yang tidak layak maka penanganannya melalui bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), namun jika faktor penyebabnya sanitasi maka penanganannya melalui pembangunan jamban keluarga sehat dan sanitasi.

"Para kepala PD akan kami 'kawinkan' dengan 40 camat untuk melakukan intervensi stunting di kecamatan masing-masing. Tiap camat akan didampingi satu kepala PD dan pejabat utama yang ditugaskan menangani stunting melalui Surat Keputusan Bupati, supaya Kabupaten Bogor bebas stunting 2024," imbuh Burhanudin. ●**gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PAMERAN BOGOR INNOVATION AWARDS 2023

Siswa SMPN 20 Kota Bogor menunjukkan briket biomassa dari pengolahan limbah plastik jenis PE dan limbah organik saat pameran Bogor Innovation Awards 2023 di Bogor Creative Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/8). Bogor Innovation Awards 2023 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor yang diikuti sebanyak 326 peserta dari tingkat SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi di Kota Bogor tersebut mengambil tema pementapan daya saing daerah melalui penguatan ekosistem inovasi.

Ridwan Kamil Ajak Generasi Muda Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pesta demokrasi merupakan ajang untuk menentukan masa depan bangsa. "Karena keputusan mereka akan memengaruhi apakah sekolah gratis, kesehatan gratis, hak ibu dan anak dan lansia. Itu politik, sebuah sistem yang dijalankan untuk menentukan masa depan," kata Ridwan.

DEPOK (IM) - Pemilihan Umum dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang Pemilu 2024 terdiri dari pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden,

juga pemilihan kepala daerah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak generasi muda, terutama pemilih-pemilih baru untuk ikut berkon-

tribusi membawa kualitas demokrasi menjadi naik kelas.

Menurutnya, hal tersebut penting karena pesta demokrasi pemilu akan menentukan kesejahteraan masyarakat selama kepemimpinan mendatang. "Kita harus menaikkan kualitas demokrasi kita menjadi ajang pemilihan pemimpin-pemimpin yang berkualitas," ujar Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil pada acara "The Nation Fest - Political Roadshow" di Balai Prawiro Purnomo Kampus Universitas Indonesia, Kota Depok, Rabu (30/8).

Dikutip dari laman humas Pemprov Jabar, Kang Emil mengatakan pesta demokrasi

merupakan ajang untuk menentukan masa depan bangsa. "Karena keputusan mereka akan memengaruhi apakah sekolah gratis, kesehatan gratis, hak ibu dan anak, dan lansia. Itu politik, sebuah sistem yang dijalankan untuk menentukan masa depan," sambungnya.

Dijelaskan Kang Emil, hasil survei menunjukkan bahwa dari sekitar 120 orang pemilih muda, yang peduli terhadap politik ternyata kurang dari 20 persennya. Hasil tersebut cukup menyedihkan karena memberikan efek domino terhadap rendahnya angka partisipasi generasi muda dalam pemilu.

"Jadi poin saya satu, to-

long jangan apatis. Mudah-mudahan tahun depan berpartisipasi menentukan langkah," katanya.

Lebih jauh Kang Emil berpesan agar pada pemilu 2024 tidak ada lagi perpecahan dengan saling merendahkan lawan politik. Dengan demikian kualitas demokrasi dapat sukses atau dapat dikatakan naik kelas.

"Pesan saya, berkampanye dalam kebaikan, nggak usah ada black campaign, jelek-jelekin lawan. Kalau itu terjadi, berarti kita naik kelas, demokrasi yang mahal ini menghasilkan sebuah kualitas yang luar biasa menuju Indonesia yang makin keren dan maju," tegasnya. ●**yy**

Diskominfo Kabupaten Bogor Ikut Gelar Wicara Peningkatan Peran Public Relations

CIBINONG (IM) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor berpartisipasi dalam acara Gelar Wicara Peningkatan Peran Public Relations dalam mengembangkan usaha dan industri, di Aula Kantor BPRS BTB, Cibinong pada Rabu (30/8).

Kegiatan diselenggarakan Perhimpunan Hubungan Masyarakat (PERHUMAS) Indonesia Badan Pengurus Cabang (BPC) Bogor bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bogor Tegar Beriman (BTB). Hadir sebagai narasumber, Direktur Utama BPRS BTB, Dedin Nazarudin dan CEO Center for Public Relations, Outreach and Communication (CPROCUM), Emilia Bassar.

Selain itu, hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Bogor, perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bogor, Forum UMKM / KM Kabupaten Bogor, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dan Humas Kebun Raya Bogor, jajaran pengurus BPC Perhumas Bogor dan Perhumas Muda Bogor.

Mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Dadang Imansyah mengucapkan terima kasih kepada BPC Perhumas Bogor dan BPRS BTB yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini.

"Pertanyaan-pertanyaan yang ada selama ini, bisa dijawab dengan sangat solutif oleh narasumber, khususnya terkait tentang tantangan perkembangan teknologi untuk para pelaku humas," ucap Dadang.

Diskominfo berharap bisa berkolaborasi dengan BPC Perhumas Bogor untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan serupa. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi humas, khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.

Membuka kegiatan, Ketua BPC Perhumas Bogor, Mariana RA Siregar mengatakan, kegiatan

ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata bagaimana kami membangun relasi dengan para praktisi humas di berbagai institusi, serta mendorong peningkatan kapasitas SDM humas.

"Kami adalah organisasi profesi para praktisi humas dan komunikasi di Indonesia yang bertujuan meningkatkan keterampilan profesional, memperluas dan memperdalam pengetahuan di bidang komunikasi dan public relations, meningkatkan kapasitas dan pertukaran pengalaman masing-masing institusi serta para anggotanya," kata Mariana.

Mariana berharap, semoga apa yang dilakukan pihaknya bisa bermanfaat meningkatkan peran public relation dalam mengembangkan usaha dan industri. Dan tentunya kita bisa menjalin silaturahmi yang berkelanjutan di kemudian hari.

Direktur Utama BPRS BTB, Dedin Nazarudin mengungkapkan rasa terima kasih atas kolaborasi antara BPC Perhumas Bogor dengan BPRS BTB dalam menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas humas di institusi dan lembaga ini. Kemudian terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dan peserta gelar wicara ini, setelah ini mudah-mudahan bisa terus bersilaturahmi, bersinergi, dan berkolaborasi.

"Inti dari kegiatan ini adalah kita berkomunikasi dan bersilaturahmi, dengan begitu mudah-mudahan bisa menjadikan satu landasan kita untuk bisa saling mengenal lebih jauh. Dan tentunya bisa meningkatkan peran humas dalam mengembangkan usaha dan industri," ungap



Direktur Utama BPRS BTB, Dedin Nazarudin dalam acara Wicara Peningkatan Peran Public Relations.

Pemprov dan PWI Jabar Sukses Gelar UKW di 8 Daerah se-Jawa Barat



Sinergi Pemprov Jawa Barat bersama PWI Jabar Selenggarakan UKW di 8 daerah.

BOGOR (IM) -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar mencatat rekor dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan peserta terbanyak di Indonesia dalam kurun waktu 8 bulan.

Program yang digagas oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini berhasil menjangkau sebanyak 648 peserta dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Dari 648 peserta UKW itu yang kompeten sebanyak 483 orang. Sedangkan sisanya belum kompeten.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, DR. Ika Mardiah dalam keterangan pers, Kamis (31/8) menyebut program UKW merupakan bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat mewujudkan Jawa Barat Juara di sektor sumber daya manusia (SDM). "Pemprov Jabar ingin berkontribusi meningkatkan kualitas wartawan lewat penyelenggaraan UKW bagi wartawan," kata Ika.

Atas pencapaian ini, Pemprov Jabar mendapat penghargaan dari PWI Pusat pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu, Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Diskominfo atas kolaborasi yang telah tercipta selama ini. Ini menunjukkan kerja sama pentahelix memang sangat dibutuhkan untuk membangun Jawa Barat.

"Terima kasih Gubernur Jabar dan Diskominfo. Kolaborasi ini juga telah menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ujar Hilman.

Hilman berharap, kolaborasi ini bisa terus berlanjut sehingga pembangunan sumber daya manusia di Jabar akan semakin juara. Sedangkan Penanggungjawab UKW PWI Jabar, Ahmad Syukri mengungkapkan, tingkat kelulusan dari pelaksanaan road show UKW mencapai 87 persen.

Ia berharap, dari titik pertama hingga ke delapan tercatat sebanyak 648 orang pendaftar. Namun yang mengikuti ujian profesionalisme wartawan. Sehingga, kata dia, akan berimbas pula terhadap meningkatkan kualitas jurnalistik yang dihasilkan wartawan. "Jika wartawan semakin profesional, maka bisa membantu mengangkat berita-berita hoaks di masyarakat," bebarnya.

Ke depan, sambungnya, program ini terus akan berlanjut setiap tahunnya, sebagaimana komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan kompetensi wartawan. "Tahun depan mudah-mudahan dapat kita akan gelar lagi. Mengingat animo dari peserta masih tinggi," tutupnya. ●**gio**